



Kinerja Pegawai Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah

Roy Martin ¹⁾; Antonio Imanda ²⁾; Marida Sariningsih ³⁾; Yanuar Rikardo ⁴⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ rooymartin98@gmail.com, ²⁾ antonioimanda@unived.ac.id, ³⁾ marida.ap@unived.ac.id, ⁴⁾ yanuarrikardo@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [07 Mei 2024]
Revised [20 Juni 2024]
Accepted [25 Juni 2024]

KEYWORDS

Employee Performance, Land Certificate.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pegawai Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang informan kunci dan 2 orang informan pokok. Penelitian ini menggunakan teori kinerja (Mahsun, 2006:77) dengan hasil penelitian sebagai berikut: 1. Masukan (Input): dalam pembuatan SKT yang dilakukan oleh masyarakat tidak ditarik biaya semuanya digratiskan oleh pemerintah kecamatan dikarenakan ada intruksi dari pihak kabupaten. 2. Proses (Process): pembuatan SKT oleh pihak kecamatan tidak tepat waktu hal ini dikarenakan SKT diselesaikan lebih dari satu bulan sehingga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada pegawai kecamatan. 3. Keluaran (Output): dalam pembuatan SKT pihak Kantor Kecamatan tidak ada target jumlah SKT yang harus dikeluarkan, karena tergantung usulan dari masyarakat yang membutuhkannya. 4. Hasil (Outcomes): kualitas bahan kertas yang digunakan pembuatan untuk SKT lebih bagus dari sebelumnya dan pembuatan SKT pegawai yang sudah ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 5. Manfaat (Benefit): tingkat kesadaran masyarakat akan manfaatnya SKT cukup tinggi sehingga semua tanah yang ada kebanyakan sudah memiliki SKT secara pribadi. 6. Dampak (Impact): adanya dampak positif dari SKT yang dimiliki oleh masyarakat yaitu kejelasan hukum hak atas kepemilikan tanah pribadi yang diatur oleh Undang-Undang Pertanahan oleh negara, nilai jual harga tanah tinggi dan dapat digunakan sebagai angunan kepada lembaga keuangan sebagai jaminan untuk memudahkan pinjaman.

ABSTRACT

This research purpose is to find out the performance of employees in creating land certificate at Merigi Sakti District of Seluma regency. This research is descriptive qualitative research. Data are collected by using interview, observation and documentation. In this research there are 4 informants, 2 people as key informants and the other 2 as main informant. This research use performance theory (Mahsum, 2006: 7) with results as below: 1. The input: in making land certificate, there was no any free people have to pay, everything is free because there was an instruction from regency government, 2. Process: in making land certificate, the process was not completed on time because the certificate finished more than one month and because of that society started not to believe with this officers, 3. The output, the officer doesn't have target to indicate how many certificates must be finished because it depends on the number of requested people. 4. Outcome the quality of the certificate is better than before and the officers are skilled based on their skill background, 5. Benefit, the awareness level of society about the benefit from certificate are quite high almost all land have certificate personally, 6. Impact, the positive impact from having land certificate is about the legal low of private land ownership which regulated by laws of land by nation, the price of land is high and can be used as a collateral to finance department to simplify the loan.

PENDAHULUAN

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai tujuan secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan benar. Atas dasar tujuan tersebut, dirancang sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya alam, sumber daya capital, sumber daya manusia, teknologi, dan mekanisme kerja yang ditempuh dalam mencapai tujuan organisasi. Faktor yang sangat penting untuk diperhatikan terletak pada faktor manusianya dibandingkan dengan sumber daya yang lainnya. Instansi pemerintah memiliki tujuan atau berfungsi sebagai pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan menjalankan administrasi pemerintah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga akan menjadi batu sandungan dalam era globalisasi, karena era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Jika bangsa Indonesia ingin berkiprah dalam percaturan global, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menata sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, spiritual, kreativitas, moral, maupun tanggung jawab.

Kualitas sumberdaya manusia berkaitan dengan kinerja (performance). Pegawai bagi sebuah instansi merupakan komponen yang penting dalam aktivitas suatu instansi, karena dalam memberikan

pelayanan kepada publik. Untuk itu diperlukan kinerja pegawai yang optimal guna mendukung Pelaksanaan tugas instansi yang bersangkutan sehingga seluruh rencana yang telah ditetapkan instansi tersebut dapat dicapai. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya, terutama tujuan organisasi. Terdapat kecenderungan tanggapan dari masyarakat tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon. Namun antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para pengelola dan pejabat pemerintah sering berbeda. Artinya, terjadi kesenjangan harapan (expectation) yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para direct user dari masyarakat.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah sangat dibutuhkan adanya indikator yang jelas oleh stakeholder. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitungsertadigunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai. Dengan demikian, tanpa adanya indikator kinerja, sulit untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijaksanaan maupun program suatu instansi pemerintah. Dengan indikator kinerja, suatu organisasi mempunyai tujuan yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau tidak berhasil dimasa yang akan datang. Salah satu instansi penyedia pelayanan di Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah yang dalam hal ini sebagai pelaksana pelayanan publik yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik. Kecamatan dalam struktur pemerintahan, harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mampu memperlihatkan kinerja yang baik. Namun di lapangan sering sekali di jumpai keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang di berikan oleh aparatur pemerintah di kecamatan, kurangnya keramahan pegawai juga menyebabkan masyarakat kurang dilayani dengan baik, pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan kepada masyarakat adalah "Surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, kartu keluarga (KK), surat keterangan tanah (SKT), dan lain-lain.

LANDASAN TEORI

Mahsun, 2006:77 mengemukakan bahwa jenis indikator kinerja pemerintah daerah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Berikut adalah penjelasan dari teori indikator kinerja yang disampaikan oleh Mahsun. Penjelasan dari jenis-jenis diatas adalah sebagai berikut:

1. Indikator masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: a. Jumlah dana yang dibutuhkan; b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan; c. Jumlah infrastruktur yang ada; serta d. Jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator proses (Process). Dalam indikator ini, organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/instansi. Misalnya: Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan.
3. Indikator keluaran (Output), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya: Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, serta ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil (Outcomes), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya: a. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan; b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.
5. Indikator manfaat (Benefit), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Tingkat partisipasi masyarakat.



6. Indikator dampak (Impact), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative.

Disini penulis akan meneliti kinerja pegawai Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan 6 jenis indikator pemerintah daerah menurut Mahsun, 2006:77 yaitu 1). Indikator masukan yang terdiri dari jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai dan jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan surat keterangan tanah. 2). Indikator proses terdiri dari kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan surat keterangan tanah. 3). Indikator keluaran yaitu jumlah produk atau jasa serta ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa dalam pembuatan surat keterangan tanah. 4). Indikator hasil yaitu produktivitas para pegawai dalam pembuatan surat keterangan tanah. 5). Indikator manfaat terdiri dari tingkat kepuasan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan tanah. 6). Indikator dampak yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif dari pembuatan surat keterangan tanah.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Sedangkan menurut ahli Bodgan dan Taylor (1991:21-22) dalam buku Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Sugiyono (2012:7-8) penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dengan landasan teori ini akan dimanfaatkan penulis sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu "membuka pintu" kemana saja peneliti melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2010: 400). Dalam penelitian ini peneliti mencari beberapa orang yang menjadi tokoh kunci dari objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 (empat) orang informan penelitian, terdiri dari dua orang pegawai kantor kecamatan dan dua orang dari masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data literature dan lapangan. Literatur yang berkenaan dengan teori-teori yang diperlukan oleh peneliti sebagai pembanding. Sedangkan lapangan untuk mencari data yang diperlukan peneliti untuk dituangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pegawai Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah

Setelah melakukan observasi serta wawancara secara langsung ke lapangan yang memakan waktu kurang lebih 4 minggu, penulis mendapatkan 4 informan yang telah dipilih. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis hasil wawancara yang di peroleh oleh penulis di lapangan terdapat keberagaman pendapat dari informan mengenai Kinerja Pegawai Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) menggunakan 6 jenis indikator kinerja pemerintah daerah menurut Mahsun, 2006:7. Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana Kinerja Pegawai Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah. Berikut indikator yang penulis gunakan dalam penelitian :

Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran yaitu jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai serta jumlah waktu yang dibutuhkan.

1. Jumlah dana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembuatan surat keterangan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan SKT yang dilakukan oleh masyarakat tidak di tarik biaya sama sekali oleh aparat kecamatan dikarenakan lokasi masih bisa di jangkau, jelas tanahnya tidak dalam sengketa dan ada saksinya terutama tapal batas tanah namun ada beberapa dipungut biayanya jika lokasi yang di ajukan sangat jauh.

2. Jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam pembuatan SKT apakah sudah cukup untuk melayani pembuatan SKT di Kantor Kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang ada di kecamatan sudah cukup untuk berkerja dan melayani semua masyarakat akan tetapi kinerja pegawai masih kurang maksimal dikarenakan terkendala dengan pegawai yang ada cuti, dinas luar dan acara keluarga sehingga kinerja dan pelayanan pada masyarakat menjadi terkendala. Selanjutnya jika dilihat dari jumlah pegawai dari kecamatan tersebut sudah cukup banyak untuk berkerja untuk melayani masyarakat akan tetapi sering sekali dalam pengurusan SKT sering tertunda akibat pegawainya tidak masuk kerja.

3. Jumlah waktu yang digunakan dalam pembuatan SKT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan SKT dengan menggunakan waktu tiga jam selesai dengan semua persyaratan terpenuhi akan tetapi yang memakan waktu satu atau dua minggu dikarenakan tim survey dari kecamatan akan melihat letak dan lokasi tanah yang akan diajukan oleh pemohon. Selanjutnya pembuatan SKT tidak diberikan biaya sama sekali dari masyarakat asalkan persyaratan pembuatan SKT tersebut terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pegawai yang ada di kecamatan sudah cukup untuk berkerja dan melayani semua masyarakat akan tetapi kinerja pegawai masih kurang maksimal dikarenakan terkendala dengan pegawai yang ada cuti, dinas luar dan acara keluarga sehingga kinerja dan pelayanan pada masyarakat menjadi terkendala. Sedangkan dalam pembuatan SKT hanya memakan waktu tiga jam sudah selesai dengan catatan administrasi sudah terpenuhi yang telah ditetapkan oleh pihak kecamatan, akan tetapi ada juga sebagian sampai 2 minggu lebih dikarenakan pegawainya tidak masuk kerja dikarenakan kesibukan lain.

Indikator Proses (Process)

Dalam indikator proses organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi.

1. Ukuran kegiatan dari segi kecepatan untuk pembuatan SKT dalam jangka waktu tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan SKT hanya memakan waktu tiga jam saja kalau persyaratan sudah lengkap dan tidak terkendala dilapangan terutama tim survey akan tetapi kebanyakan selesai pembuatan SKT sampai 1 dan 2 bulan baru selesai di karenakan melengkapi persyaratan yang ada. Pembuatan SKT dari pihak kecamatan kebanyakan satu atau dua bulan selesainya akan tetapi ada sebagian dalam pembuatannya lima jam sudah selesai yang dilakukan oleh pihak pegawai kecamatan.

2. Ukuran kegiatan dari segi ketepatan waktu maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan pembuatan SKT dilihat cepat dan tepat waktu dalam pembuatan SKT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan SKT waktu sudah tepat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh masyarakat walaupun masih ditemukan yang kurang tepat waktu penyelesaiannya. Pembuatan SKT oleh pihak kecamatan tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya SKT bisa diselesaikan lebih kurang selama satu bulan atau lebih sehingga tidak tepat waktu dalam penyelesaian yang diajukan oleh masyarakat.

3. Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan para pegawai kantor Camat dalam menjalankan tugasnya terutama pembuatan SKT dan tidak ada pungutan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pegawai kecamatan dalam berkerja selalu berpatokan pada aturan undang-undang yang ada dan tidak melanggar aturan tersebut dalam pembuatan SKT yang diajukan oleh masyarakat. Pembuatan SKT hanya memakan waktu tiga jam saja kalau persyaratan sudah lengkap dan tidak terkendala dilapangan terutama tim survey akan tetapi kebanyakan selesai pembuatan SKT sampai 1 dan 2 bulan baru selesai di karenakan melengkapi persyaratan yang ada. Dalam pembuatan SKT waktu sudah tepat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh masyarakat walaupun masih ditemukan yang kurang tepat waktu penyelesaiannya. Pihak pegawai kecamatan dalam berkerja selalu berpatokan pada aturan undang-undang yang ada dan tidak melanggar aturan tersebut dalam pembuatan SKT yang diajukan oleh masyarakat. Pegawai yang ada di kecamatan dalam berkerja sesuai dengan aturan yang ada, pegawai tidak mau diberikan uang atau barang dari masyarakat beralasan kami sudah di gaji oleh Negara kalau masih ada persyaratan yang masih kurang tolong dilengkapi agar bisa di proses pembuatan SKT tersebut.

Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan



yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

1. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dalam pembuatan SKT apakah ada target dalam perbulan atau pertahun sebagai acuan dalam berkerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh pihak kecamatan kebanyakan surat-surat penting lainnya tapai dibagian pembuatan SKT. Dalam pembuatan SKT pihak Kantor Kecamatan tidak ada target berapa jumlahnya SKT itu yang harus dikeluarkan tergantung usulan dari masyarakat yang membutuhkannya. Kantor Kecamatan dalam hal pembuatan SKT tidak ada target dalam pembuatannya berapa hasilnya tergantung kepengurusan masyarakat itu sendiri, akan tetapi memang ada anjuran untuk masyarakat wajib mebuatkan SKT agar hak kepemilikan lahan tana di akui oleh negara.

2. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa terkait dengan pembuatan SKT bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Kantor Camat mengeluarkan SKT bagi masyarakat untuk kepemilikan atas tanah pribadi yang ada dasar hukumnya sebagai bukti yang syah yang dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Produk yang dihasilkan oleh pihak kecamatan kebanyakan surat-surat penting lainnya tapai dibagian pembuatan SKT. Dalam pembuatan SKT pihak Kantor Kecamatan tidak ada target berapa jumlahnya SKT itu yang harus dikeluarkan tergantung usulan dari masyarakat yang membutuhkannya. Pihak Kantor Camat mengeluarkan SKT bagi masyarakat untuk kepemilikan atas tanah pribadi yang ada dasar hukumnya sebagai bukti yang syah yang dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Adanya ketepatan pemerintahan kecamatan dengan mengeluarkan SKT kepada masyarakat yang sudah memenuhi persaratanya yang telah ditetapkan sehingga tanah yang ada SKTnya akan bernilai jual sangat tinggi.

Indikator Hasil (Outcomes)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

1. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dalam pembuatan SKT oleh pihak kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan SKT bahan kertasnya langsung disediakan oleh pemerintah yang ada standarnya bukan sembarang kertas dan pembuatan SKT pegawai tertentu yang ahlinya yang ditempatkan di kantor kecamatan oleh pemerintah daerah pada saat penugasan kerjanya. Kualitas bahan kertas yang digunakan pembuatan untuk SKT lebih bagus dari sebelumnya dan pembuatan SKT pegawai yang sudah ahli bukan sembarang pegawai.

Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

1. Tingkat kepuasan masyarakat dalam pembuatan SKT dari hasil kerja pegawai kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai di bagian pembuatan SKT sangat bagus dan puas hasil kerja pegawai tersebut, walaupun ada sedikit kendala dalam pembuatannya akan tetapi semuanya dapat diselesaikan. Kinerja pegawai pada bagian pembuatan SKT cukup bagus dalam menyelesaikan pembuatannya akan tetapi sering kali pegawai datang terlambat dan bahkan tidak masuk kerja sehingga masyarakat dirugikan baik itu waktu dan tenaga.

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan SKT secara pribadi atau kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan SKT yang diajukan ke pada Kantor Kecamatan sangatlah tinggi dimana dengan dibuktikan dari buku laporan administrasi kecamatan dan sering kali belangko kosong akibat permintaan masyarakat dalam pembuatan SKT tersebut. Kinerja pegawai di bagian pembuatan SKT sangat bagus dan puas hasil kerja pegawai tersebut, walaupun ada sedikit kendala dalam pembuatannya akan tetapi semuanya dapat diselesaikan. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan SKT yang diajukan ke pada Kantor Kecamatan sangatlah tinggi dimana dengan dibuktikan dari buku laporan administrasi kecamatan dan sering kali belangko kosong akibat permintaan masyarakat dalam pembuatan SKT tersebut. Sedangkan tingkat kesadaran masyarakat akan manfaatnya SKT sudah tinggi sehingga semua tanah yang ada kebanyakan sudah ada SKT nya masing-masing dan memperjelas kepemilikan tanah secara pribadi.

Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negative,

dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan.

1. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, Pengaruh positif (Kebaikan) kepada masyarakat yang sudah memiliki SKT.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kejelasan atas kepemilikan tanah pribadi dengan dibuktikan SKT yang mana ada dasar hukumnya yang di ataur oleh Undang-Undang Pertanahan dari pemerintahan dan tanah tersebut bernilai ekonomi yang tinggi. Dampak atau pengaruh positifnya adanya kejelasan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Peranahan oleh negara, nilai jual harga tanah tersebut mengalami peningkatan tinggi dan tanah tersebut dapat dianggunkan kepada lembaga keuangan untuk dijadikan jaminan sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan uang untuk konsumsi sendiri.

2. Pengaruh negatif atau kurang baik bagi masyarakat sudah memiliki SKT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat dalam pembuatan SKT ingin cepat mendapatkan uang secara cepat dengan cara memberikan anggunan untuk mendapatkan pinjaman ke bank yang mereka tunjuk sehingga masyarakat akan menjadikan beban untuk membayar ansuran tersebut. Adanya kejelasan atas kepemilikan tanah pribadi dengan dibuktikan SKT yang mana ada dasar hukumnya yang di ataur oleh Undang-Undang Pertanahan dari pemerintahan dan tanah tersebut bernilai ekonomi yang tinggi.

Kebanyakan masyarakat dalam pembuatan SKT ingin cepat mendapatkan uang secara cepat dengan cara memberikan anggunan untuk mendapatkan pinjaman ke bank yang mereka tunjuk sehingga masyarakat akan menjadikan beban untuk membayar ansuran tersebut. Ada dampaknya tidak ada kebebasan pemilikan atas tanah akibat SKT tersebut sudah digadaikan untuk anggunan ke bank dan harga jual tanah akan berkurang nilai jualnya atau ada perjanjian jual beli tanah bersangkutan.

Pembahasan

Kinerja Pegawai Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) Sementara menurut Indikator dalam penelitian ini teori kinerja (Mahsun, 2006:77) mengemukakan bahwa:

1. Indikator Masukan (Input)

Dalam pembuatan SKT yang dilakukan oleh masyarakat tidak di tarik biaya sama sekali oleh aparat kecamatan dikarenakan lokasi masih bisa di jangkau artinya tempat tanah yang di sorve masih bisa di datangi oleh petugas survey, jelas tanahnya tidak dalam sengketa maksudnya tanah yang akan dibuat SKT tidak dalam sengketa sehingga dalam pengurusannya lebih mudah dan lancar tanpa ada hambatan dan ada saksinya terutama tapal batas tanah saksi yang sangat penting untuk membuat SKT karena disini menjelaskan bahwa syahnya lokasi tanah tersebut benar adanya dan jelas tapal batasnya sehingga ketika SKT sudah jadi tidak akan menimbulkan masalah dan menghindari SKT tumpang tindih dalam kepemilikannya oleh sebab itu catatan tanah yang sudah ada SKT nya biasanya pihak kecamatan mempunyai arsip tersendiri, gunanya untuk menghindari kepemilikan ganda.

Kalau dilihat dari jumlah pegawai dari kecamatan tersebut sudah cukup banyak untuk berkerja untuk melayani masyarakat akan tetapi sering sekali dalam pengurusan SKT sering tertunda akibat pegawainya tidak masuk kerja. Penyakit malas ini yang sering merugikan orang lain yang mau berurusan ke kantor camat ada beberapa pegawai yang jarang kali masuk bisa dihitung dengan jari walaupun sudah ada sanksinya sepertinya di kecamatan ini tidak berlaku bagi semua pegawai terbukti tidak ada sanksi tegas dari pimpinan yakni camat itu sendiri.

Pembuatan SKT hanya memakan waktu tiga jam sudah selesai dengan catatan administrasi sudah terpenuhi yang telah di tetapkan oleh pihak kecamatan, akan tetapi ada juga sebagian sampai 2 minggu lebih dikarenakan pegawainya tidak masuk kerja dikarenakan kesibukan lain.

2. Indikator Proses (Process)

Pembuatan SKT dari pihak kecamatan kebanyakan satu atau dua bulan selesainya akan tetapi ada sebagian dalam pembuatannya lima jam sudah selesai yang dilakukan oleh pihak pegawai kecamatan. Ini lah yang sering di keluhkan oleh masyarakat katanya pembuatan SKT tidak memakan lama waktunya kebanyakan selesainya di atas dua bulan bahkan ada yang lebih, sehingga masyarakat bertanya-tanya apasi tugas pegawai ini dalam menyelesaikan pembuatan SKT tersebut sehingga banyak masyarakat bertanya kalau memang gratis kenapa lama prosesnya lebih baik terus terang berapa biayanya dan cantumkan waktu berapa hari atau jam biar masyarakat mengambil alternative lainnya.

Pembuatan SKT oleh pihak kecamatan tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya SKT bisa diselesaikan lebih kurang selama satu bulan atau lebih sehingga tidak tepat waktu dalam penyelesaian yang di



ajukan oleh masyarakat. Apa lagi menyangkut waktu tidak ada kepastian yang jelas banyak kali alasan pegawainya sehingga masyarakat sedikit kecewa dengan pegawai tersebut yang ada di kecamatan. Pegawai yang ada di kecamatan dalam berkerja sesuai dengan aturan yang ada, pegawai tidak mau diberikan uang atau barang dari masyarakat beralasan kami sudah di gaji oleh Negara kalau masih ada persyaratan yang masih kurang tolong dilengkapi agar bisa di proses pembuatan SKT tersebut.

3. Indikator Keluaran (Output)

Kantor Kecamatan dalam hal pembuatan SKT tidak ada target dalam pembuatannya berapa hasilnya tergantung kepengurusan masyarakat itu sendiri, akan tetapi memang ada anjuran untuk masyarakat wajib membuat SKT agar hak kepemilikan lahan tana di akui oleh negara. Selama ini SKT yang dibuat oleh kecamatan tidak ada target yang di umumkan atau ditulis di papan pengumuman sehingga tidak ada kejelasan yang pasti dalam jangka waktu tertentu berapa yang dapat diselesaikan pembuatnya. Adanya ketepatan pemerintahan kecamatan dengan mengeluarkan SKT kepada masyarakat yang sudah memenuhi persaratanya yang telah ditetapkan sehingga tanah yang ada SKT nya akan bernilai jual. Tepapt tidak juga kenyataannya banyak masyarakat yang pembuatannya lamban dan bahkan berbeda dengan kenyataannya dalam pelaksanaannya.

4. Indikator Hasil (Outcomes)

Kualitas bahan kertas yang digunakan pembuatan untuk SKT lebih bagus dari sebelumnya dan pembuatan SKT pegawai yang sudah ahli bukan sembarang pegawai. Kalu kuwalitas kertas sudah baik dibandingkan sebelumnya akan tetapi seringkali masyarakat terhambat dalam pembuatannya dikarnakan kertas itu sudah habis dan mau dipesan terlebih dahulu sehingga masyarakat menunggu cukup lama apa lagi ada penjelasan tunggu antrian karena masih mengisi ketempat atau kecamatan lain.

5. Indikator Manfaat (Benefit)

Kinerja pegawai pada bagian pembuatan SKT cukup bagus dalam menyelesaikan pembuatannya akan tetapi sering kali pegawai datang terlambat dan bahkan tidak masuk kerja sehingga masyarakat dirugikan baik itu waktu dan tenaga. Inilah yang sering dilakukan oleh pegawai kecamatan sering kali tidak masuk kerja dengan berbagai macam alasan sehingga pelayanan pembuatan SKT sering kali terhambat sehingga memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu terkadang masyarakat yang pingin mengajukan pembuatan SKT banyak berpikir ulang karena mengingat waktu dan biaya yang cukup tinggi menuju kantor camat. Akhirnya banyak yang ditunda dalam pembuatan SKT tersebut. Tingkat kesadaran masyarakat akan manfaatnya SKT sudah tinggi sehingga semua tanah yang ada kebanyakan sudah ada SKT nya masing-masing dan memperjelas kepemilikan tanah secara pribadi.

6. Indikator Dampak (Impact)

Ada dampak pengaruh positifnya adanya kejelasan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Peranahan oleh negara, nilai jual harga tanah tersebut mengalami peningkatan tinggi dan tanah ersebut dapat di anggunkan kepada lembaga keuangan untuk dijadikan jaminan sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan uang untuk kosumsi sendiri.

Ada dampaknya tidak ada kebebasan pemilikan atas tanah akibat SKT tersebut sudah digadaikan untuk anggunan ke bank dan harga jualal tanah akan berkurang nilai jualnya atau ada perjanjian jual beli tanah bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam pembuatan SKT yang dilakukan oleh masyarakat tidak di tarik biaya semuanya di geratiskan oleh pemeritahan kecamatan dikarenakan ada intruksi dari pihak kabupaten. Jumlah pegawai kecamatan cukup banyak untuk berkerja melayani masyarakat akan tetapi sering sekali dalam pengurusan SKT sering tertuda akibat pegawainya tidak masuk kerja.
2. Pembuatan SKT oleh pihak kecamatan tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya SKT bisa diselesaikan lebih kurang selama satu bulan atau lebih sehingga menyebabkna ketidak percayaan pada pegawai kecamatan.
3. Dalam pembuatan SKT pihak Kantor Kecamatan tidak ada target berapa jumlahnya SKT itu yang harus dikeluarkan tergantung usulan dari masyarakat yang membutuhkannya.
4. Kualitas bahan kertas yang digunakan pembuatan untuk SKT lebih bagus dari sebelumnya dan pembuatan SKT pegawai yang sudah ahli sesuai dengan latar belakan pendidikannya bukan sembarang pegawai.
5. Tingkat kesadaran masyarakat akan manfaatnya SKT cukup tinggi sehingga semua tanah yang ada kebanyakan sudah di SKT nya masing-masing dan memperjelas kepemilikan tanah secara pribadi.

6. Ada dampak pengaruh positifnya adanya kejelasan hukum hak atas kepemilikan tanah pribadi yang diatur oleh Undang-Undang Peranahanoleh negara, nilai jual harga tanah tinggi dan dapat di gunakan sebagai anggunan kepada lembaga keuangan sebagai jaminan untuk memudahkan pinjaman.

Saran

1. Penempatan dan jabatan yang ada dikantor camat sesuai dengan kepangkatan yang secara umum berlaku bukan karena kedekatan dengan pimpinan yang berkuasa.
2. Pegawai kecamatan lebih tepat waktu dalam berkerja sesuai dengan aturan yang ada. Pihak kecamatan harus memiliki target dalam pembuatan SKT baik target bulanan maupun tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. UGM Press. Yogyakarta
- Anwar. 2005. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung : Refika Aditama.
- Arisanti, A., Imanda, A., & Saputra, H. (2020). Analisis Kualitas Kerja Pegawai Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkulu Tengah. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(1), 57-63. <https://doi.org/10.37676/Professional.V7i1.1093>
- Doni Juni Priansa, 2017. Manajemen Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan SDM perusahaan Penerbit Pustaka Setia Bandung.
- Eko saputra, H, (2015). Kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah (Studi Deskriptif Kualitatif di DPRD Kota Bengkulu). *Profesional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.37676/professional.v1i2.132>
- Gibson, James L. 1997. Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Gomes, Faustino C. 2005. Manajemen Sumber Daya Marmisia. Yogyakarta : CV Andi.
- Hardi, H., Saputra, H., & Asnawati, A. (2018). Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 5(2), 6-14. <https://doi.org/10.37676/professional.v5i2.961>
- Hartini, Y., Lorita, E., & C. Kader, B. A. (2022). Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 8(2), 49-56. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/1863>
- Hasibuan. 1999. "Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah", Buku Good Governance : Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Ed 1, Jakarta : CV. Haji Masagung
- Husaini Usman, 2009, Motivasi Dalam Bekerja Karyawan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Imanda, A. (2015). Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.37676/professional.v1i2.133>
- Keban, Yermias T. 2000. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Jsu. Yogyakarta : Gava Media.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mahsun, M., 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suyadi Prawirosentono, 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta : BPFE.
- Suwatno. & Priansa, D. 2011. Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2003. Good Governance : Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Memhangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Ed J, Bandung : MandarMaju
- Yusuarsono. (2015). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.37676/Professional.V1i2.135>